KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT TIM PELAKSANA
TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF INDONESIA

Hari/ Tanggal	:	Senin, 21 April 2014
Waktu	:	09.30 – 13.00 WIB
Tempat	:	Ruang Serayu – Gedung AA. Maramis II, Kemenko Perekonomian
Agenda	:	Pengesahan Laporan EITI Tahap II 2010-2011 dan Pembahasan Rekonsiliasi Minerba

Peserta Rapat

Pemerintah :

1. Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu, diwakili : M. Zainuddin, Ilham Hadiana
2. Ditjen Keuangan Daerah, Kemendagri, diwakili : Yuniar D.P., Bejo Mulyono, Ardy Daud
3. Ditjen Perbendaharaan Negara, diwakili : Taukhid
4. Ditjen Migas, diwakili : Yulianto, Dimas Ovan P.
5. SKK Migas, diwakili : Selvi, Nyimas F.Rikani, Yapit Saptaputra
6. Ditjen Anggaran, Dit. PNBP, diwakili : Puji Wibowo, Faisal J.A.
7. Dispenda Prov. Kaltim, diwakili : Eddy Kuswandi, Edward Noviansyah, Z.Hadi
8. Distamben Prov. Kaltim, diwakili : Bantolo, Istiadi

Asosiasi Industri dan perusahaan:

9. PT. Pertamina, diwakili : Alif Setadi, Iswantono, Hestu Harijadi
10. Indonesian Mining Asosiation, diwakili : Mukhlis
11. Indonesian Petroleum Asosiation, diwakili : Dipnala Tamzil
12. APBI CMA, diwakili : Supratna Suhala

Masyarakat Sipil :

13. PWYP, diwakili : Maryati Abdullah, Aryanto

Rekonsiliator KAP GIS:

14. Ade Ikhwan
15. Muhariyanto
16. Myrnie Zachraini
17. Gemi Ruwanti
18. Cindy Nur Aini
19. Andika Ahmad Fauzan
20. Angga Hergunowo
21. Rosyati Olivia

Sekretariat EITI :

22. Ketua Tim Pelaksana Transparansi, Bambang Adi Winarso
23. Sekretaris Tim Transparansi, Emy Perdanahari
24. Revenue Specialist, Ambarsari Dwi Cahyani
25. Regulatory Specialist, Ronald Tambunan
26. Communication Specialist, Fajar Reksoprodjo
27. IT Specialist, Tri Wicaksono
28. Staff : Yuliana, Edityas Nur Hutami, Eka Wahyuni

Risalah Rapat

Rapat dibuka oleh Ketua Tim Transparansi, Bambang Adi Winarso. Rapat kali ini adalah pengesahan laporan EITI tahap II tahun 2010-2011 untuk sektor Migas, yang mana sebelumnya tanggal 14 April sudah dibahas dengan tim teknis yang mewakili lembaga-lembaga dalam Tim Pelaksana dengan *Reconciller* mengenai hasil-hasil yang sudah dicapai serta input, masukan dan saran untuk laporan tahap II ini.

Agenda rapat adalah yaitu pengesahan laporan EITI tahap II tahun 2010-2011 untuk sektor Migas dan pembahasan laporan kemajuan yang menyangkut sektor tambang/ minerba.

I. Pembahasan laporan bagian migas

Presentasi oleh Sekretariat

Materi presentasi berupa ringkasan mengenai Laporan EITI Indonesia tahap II tahun 2010-2011 untuk sektor minyak dan gas bumi, presentasi disampaikan oleh Ambarsari Dwi Cahyani. (Materi presentasi sebagaimana terlampir).

Di tahun 2010 dan 2011 ada 1 (satu) perusahaan non operator yang belum melapor yaitu KNOC Sumatra Ltd dari Korea, kendalanya adalah teknis karena *contact person* perusahaannya berada di luar negeri. Dalam laporan rekonsiliator menggunakan metodologi dengan meminta konfirmasi berulang kali untuk angka yang masih ada selisih baik dari sisi KKKS ataupun dari sisi pemerintah.

Rekon juga telah menyusun apa saja yang sudah diakomodasi dari hasil rapat tim teknis sebelumnya, mungkin rensiliator akan mempresentasikannya.

Presentasi Rekonsiliator tentang masukan atas laporan

Presentasi rekonsiliator menjelaskan detail tabel dari hasil masukan, input dan saran dari rapat teknis sebelumnya, disampaikan oleh Ade Ikhwan. (Materi presentasi sebagaimana terlampir) .

Khusus untuk SKK Migas rekonsiliator mengadakan pertemuan tersendiri setelah rapat tim teknis. Karena SKK sangat concern dan detail dalam melihat angka-angka di reconciller ini. Laporan ini sarat dengan lampiran, ada 71 perusahaan yang dijelaskan di dalam lampiran yang dijelaskan untuk setiap item penerimaan dan untuk setiap perusahaan.

Semua masukan dan rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat teknis tanggal 14 April sudah diakomodasi.

Diskusi dan tanggapan peserta rapat untuk bagian migas

- Yulianto, Ditjen Migas

Pada bagian penjelasan tugas dan fungsi instansi pemerintah, belum memasukkan Kemendagri. Dalam hal ini kemendagri berperan dalam menentukan daerah penghasil.

Pimpinan rapat menanggapi, bahwa Kemendagri tidak merupakan entitas pelapor untuk laporan kali ini. Dan jika Kemendagri akan dimuat di laporan, ini perlu disepakati sebelumnya. Ini dapat dimasukkan pada laporan selanjutnya.

- Bambang Adi Winarso, Pimpinan Rapat

Menanyakan pendapat peserta apakah angka yang memiliki perbedaan, telah cukup bisa dijelaskan dalam laporan. Untuk angka yang dianggap masih besar perbedaannya, untuk ke depan perlu diminta rinciannya supaya proses rekonsiliasi menjadi lebih mudah. Disampaikan bahwa dalam laporan dapat dituliskan berapa nilai yang disebabkan oleh masing-masing penyebab perbedaan.

Selvi dari SKK Migas menanggapi, bahwa di lampiran penjelasan telah lengkap dan penjelasan sudah dibahas dengan Rekonsiliator. Bahwa perbedaan over/(under) lifting cukup besar, ini juga sudah dijelaskan dengan proses penyelesaikan kargo di periode berikutnya.

Ade Ikhwan dari Rekonsiliator menanggpi, bahwa hal ini akan ditambahkan dalam laporan.

- Emy Perdanahari, Sekretaris Tim Transparansi

Menyarankan untuk memasukkan persentase di setiap baris di kolom perbedaan.

Ade Ikhwan dari Rekonsiliator menanggpi, bahwa hal ini akan ditambahkan dalam laporan.

- Taukhid, Ditjen Perbendaharaan

Meminta penjelasan tentang bagian perbandingan dengan LKPP yang dikeluarkan dari laporan ini. Apakah ini dengan tidak dimuat dalam laporan, ini akan menyelesaikan masalah? Seharusnya dapat Rekonsiliator dapat memberikan rekomendas, karena ada perbedaan pencatatan antara yang dilakukan oleh KKKS dengan pemerintah, mungkin perlu perbaikan. Perihal standar internasional, apakah bagian perbandingan ini disyaratkan dalam standar internasional.

Menanggapi pertanyaan ini, Emy Perdahanari meminta klarifikasi kepada Sekretariat apakah perbandingan yang dimaksud adalah untuk menanggapi adanya permintaan dari pihak lain. Jika dianggap kurang perlu, maka bagian ini tidak perlu dimuat.

Ade Ikhwan dari Rekonsiliator menanggapi, bahwa dalam kerangka acuan tidak dimuat, tetapi masuk dalam *table of content* yang disarankan, jadi tidak mengikat. Dari konfirmasi dengan Dit. PNBP diperoleh informasi bahwa terdapat faktor-faktor yang perlu ditelaah lebih jauh dan hal ini di luar dari cakupan utama pekerjaan Rekonsiliator, yaitu terdiri dari perbedaan pencatatan cash dan accrual, belum mencakup informasi fee hulu migas, belum memasukkan PBB Migas, serta terdapat perbedaan kurs valuta yang digunakan. Dalam hal ini, karena Rekonsiliator tidak melakukan verifikasi maka Rekonsiliator tidak dapat memberikan rekomendasi. Rekonsiliator hanya dapat memberikan rekomendasi jika terdapat fakta dari working paper yang ditemukan oleh Rekonsilaitor pada saat melakukan prosedur.

Ambarsari dari Sekretariat menanggapi, bahwa bagian ini bukan bagian utama dari laporan. Sehingga jika dianggap bagian ini belum siap untuk dituliskan, maka dapat ditindaklanjuti pada laporan-laporan tahap selanjutnya.

Pimpinan rapat menyampaikan bahwa pekerjaan ini tergantung dari kesepakatan kita bersama, pekerjaan ini sebenarnya sudah disepakati oleh Tim Pelaksana yang dirintis mulai dari awal. Dan ke depan jika ingin ada perubahan itu bisa dilakukan dan disepakati bersama untuk ke depan. Pada laporan ini sebaiknya fokus dengan yang telah disepakati sebelumnya.

Maryati dari PWYP menanggapi, bahwa perbandingan dengan LKPP memang kemungkinan tidak tepat karena masih belum memperhitungkan faktor-faktor seperti fee hulu migas dan PBB migas, sehingga sepakat ini perlu dilihat lebih lanjut dan perlu dibahas dengan kementrian keuangan.

- M.Zainudin, Ditjen Perimbangan Keuangan

Pada Tabel 4.2 bukan penyaluran DBH SDA seharusnya realisasi PNBP yang dibagihasilkan. Karena, itu adalah angka 100% atau totalnya, 15 persennya dibagihasilkan sesuai skema.

Ade Ikhwan dari Rekonsiliator akan mengoreksi bagian ini.

- Pimpinan dan peserta rapat juga membahas bagian rekomendasi pada laporan. Terdapat bagian yang perlu diubah kata-katanya, namun bersifat minor.

2. Pembahasan bagian pertambangan mineral dan batubara

Presentasi bagian minerba oleh Rekonsiliator

Materi presentasi perkembangan laporan sektor Minerba disampaikan oleh Myrnie Zachraini. (Materi presentasi sebagaimana terlampir) .

Diskusi untuk bagian minerba

- Mukhlis, IMA

Menanyakan mengapa laporan dari DJP tidak langsung dalam bentuk USD.

Rekonsiliator menyampaikan bahwa form nya dalam bentuk Rupiah, tetapi sudah dimintakan dalam bentuk USD supaya tidak terjadi selisih kurs.

- Pimpinan rapat menyampaikan bahwa DJP adalah bagian dari Tim Pelaksana jadi perlu ikut mendorong agar laporan ini dapat diselesaikan.

Penutupan

Pimpinan rapat menyampaikan bahwa akan dikirimkan permintaan persetujuan laporan bagian migas untuk ditandatangani dan waktunya adalah 2 hari untuk mengirimkan kembali lembar persetujuan.

Rapat berakhir pukul 13.00

Catatan:

Risalah rapat ini dilengkapi lampiran sebagai berikut:

1. Materi yang telah dipresentasikan oleh Sekretariat
2. Materi yang telah dipresentasikan oleh Rekonsiliator.